

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, atau pengkajian, dan tidak diperjualbelikan;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

FITRA PIDA**NIM. 11673201396****KONSENTRASI AKUNTANSI MANAJEMEN****PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI****FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****PEKANBARU****2021**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : FITRA PIDA
 NIM : 11673201396
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 PROGRAM STUDI : AKUNTANSI S1
 JUDUL : ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK
 MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
 KINERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN
 KOTA PEKANBARU
 HARI/TANGGAL UJIAN : RABU, 06 OKTOBER 2021

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING

Dr. Dony Martias, SE., MM
 NIP. 19760306 200710 1 004

MENGETAHUI,

DEKAN

Dr. Hj. Mahyarni, SE., MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Faiza Muklis, S.E., M.Si., Ak
 NIP. 19741108 200003 2 004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : FITRA PIDA
 NIM : 11673201396
 KONSENTRASI : AKUNTANSI MANAJEMEN
 PROGRAM STUDI : S 1 AKUNTANSI
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 SEMESTER : XI (SEBELAS)
 JUDUL : ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK
 MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIEN
 PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA
 PEKANBARU
 HARI/TANGGAL : RABU, 06 OKTOBER 2021

PANITIA PENGUJI

KETUA

FAIZA MUKLIS SE.M.SlAk
NIP.19741108 200003 2 004

MENGETAHUI

PENGUJI I

DR.DESRIRMIFTAH,SE.,MM,Ak
NIP.19740412200604 2 002

PENGUJI II

FEBRI DELMI YETI S.,E.I.,M.A.
NIP.19850228201101 2 017



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FITRA PIDA
 NIM : 116 73201396
 Tempat/Tgl. Lahir : PUJUD. 09 NOVEMBER 1996
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Prodi : AKUNTANSI SZ
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS
DAN EFISIENSI KINERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA
PEKANBARU.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2. NOV. 2021....
 Yang membuat pernyataan


 FITRA PIDA
 NIM : 116 73201396

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
Oleh:

FITRA PIDA
NIM. 11673201396

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2015-2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran tahun 2015-2019 yang ada di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data kuantitatif dan kualitatif, Sumber data yang digunakan peneliti adalah sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis Data yang di gunakan si peneliti adalah teknik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, perkembangan tingkat efektivitas realisasi anggaran di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2015-2019 Pekanbaru kinerjanya sudah berjalan efektif sesuai yang di targetkan dan sudah mencapai nilai realisasinya sesuai ketentuan walaupun terjadi naik turun nya anggaran realisasi yang sudah ditentukan dan tidak pernah di bawah rata rata.

Kata Kunci : Analisis Realisasi Anggaran, Efektivitas dan Efisiensi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil‘alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru”** Shalawat beriringan salam penulis kirimkan untuk junjungan alam sekaligus suri teladan umat didunia yaitu Baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada beliau dan semoga kita mendapat syafaat beliau serta tergolong orang-orang ahli surga. Aamiin.

Penelitian skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Yang mana dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan rintangan yang dialami penulis. Namun demikian, berkat kerja keras, optimis, bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua ilmu, doa dan motivasi yang diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan dibalas oleh Allah SWT. Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna untuk itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini. Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan, mengingat keterbatasan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan penulis, dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. *Aamiin ya Robbal 'Alamiin*

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak keterbatasan pengalaman, kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT atas rahmat dan ridhonya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orang tua saya Ayah Syafrudin dan Omak Marlina yang telah membesarkan, menjaga, mendidik dan selalu mendoakan yang terbaik dalam setiap sujudnya. Serta abang (Afrizal), kakak (Nur Fitri Yani) serta adik (Masrel, Rita Laila, Gita Sari, Nadia Lestari, Dwi Meylani, dan Suci Ramdhani), serta keponakan (Lexi, Biyan, dan Nafisah). yang selalu memberi semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Acit dan Oom (Julina dan Edril Junaidi), (Lala, Niesha, Difa dan Najla) yang telah memberi semangat dan dukungan untuk sampai di titik ini.
4. Bapak Prof. Dr. Khoirunnas Rajab, M.Ag Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Riau.

7. Bapak Dr. Mahmuzar, SH, MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Dr. Julina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Ibuk Faiza Muklis, SE,M,Si.,Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Ibu Harkaneri,SE,M.SA.Ak,CA selaku Sekretaris Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Ibuk Febri Rahmi,S.E.,M.Sc.Ak selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Bapak Dr.Dony Martias,S.E.,M.M. selaku Dosen Pembimbing Proposal sekaligus Pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberikan arahan dan saran-saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
13. Seleruh Bapak / Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya selama menuntut ilmu pada almamater ini.
14. Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selalu melayani dan membeberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan kepada penulis dalam urusan surat menyurat.

15. Kepada Rahmat.amd yang selalu menemani dan mendukung semua hal.

16. Kepada pihak Pegawai Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang telah membantu melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan

17. Kepada Teman-teman kos ika dan siti yang menemani saat ujian dan teman (belle,kak long,wikot ,rini,dan iyod) yang selalu mendukung dan memotivasi yang telah diberikan penulis, semoga semua motivasi, semangat dan do'a serta bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT dan harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat untuk semua pihak.

Pekanbaru, Oktober 2021

Penulis

Fitra Pida

NIM.11673201396

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian anggaran sektor publik	8
B. Fungsi Anggaran Sektor Publik.....	10
C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	13
D. Laporan Realisasi Anggaran Publik	17
E. Pengertian Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Anggaran Sektor Publik.....	23
F. Kinerja Dalam Pandangan Islam	25
G. Penelitian Terdahulu.....	28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Kerangka Konseptual	30
------------------------------	----

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	31
B. Tempat dan Waktu Penelitian	31
C. Populasi dan Sampel	31
D. Definisi Operasionalisasi Variabel Penelitian	32
E. Jenis Data dan Sumber Data	33
F. Teknik Pengumpulan Data.....	34

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN HASIL PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan	38
B. Logo dan struktur Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	38
C. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	42
D. Riancian Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	42
E. Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2015sampai dengan 2019.....	52

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGARFI PENULIS

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Laporan Realisasi Anggaran 2015 sampai 2019.....	22
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu	28
Tabel 2.3	Kerangka Konseptual	30
Tabel 3.2	Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	40
Tabel 4.1	Laporan Anggaran Realisasi Belanja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	52
Tabel 4.2	Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas seluruh Anggaran Belanja Tahun 2015-2019	59
Tabel 4.3	Hasil Perhitungan Tingkat Efisien Anggaran Belanja Tahun 2015-2019	66
Tabel 4.4	Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahun 2015-2019	68

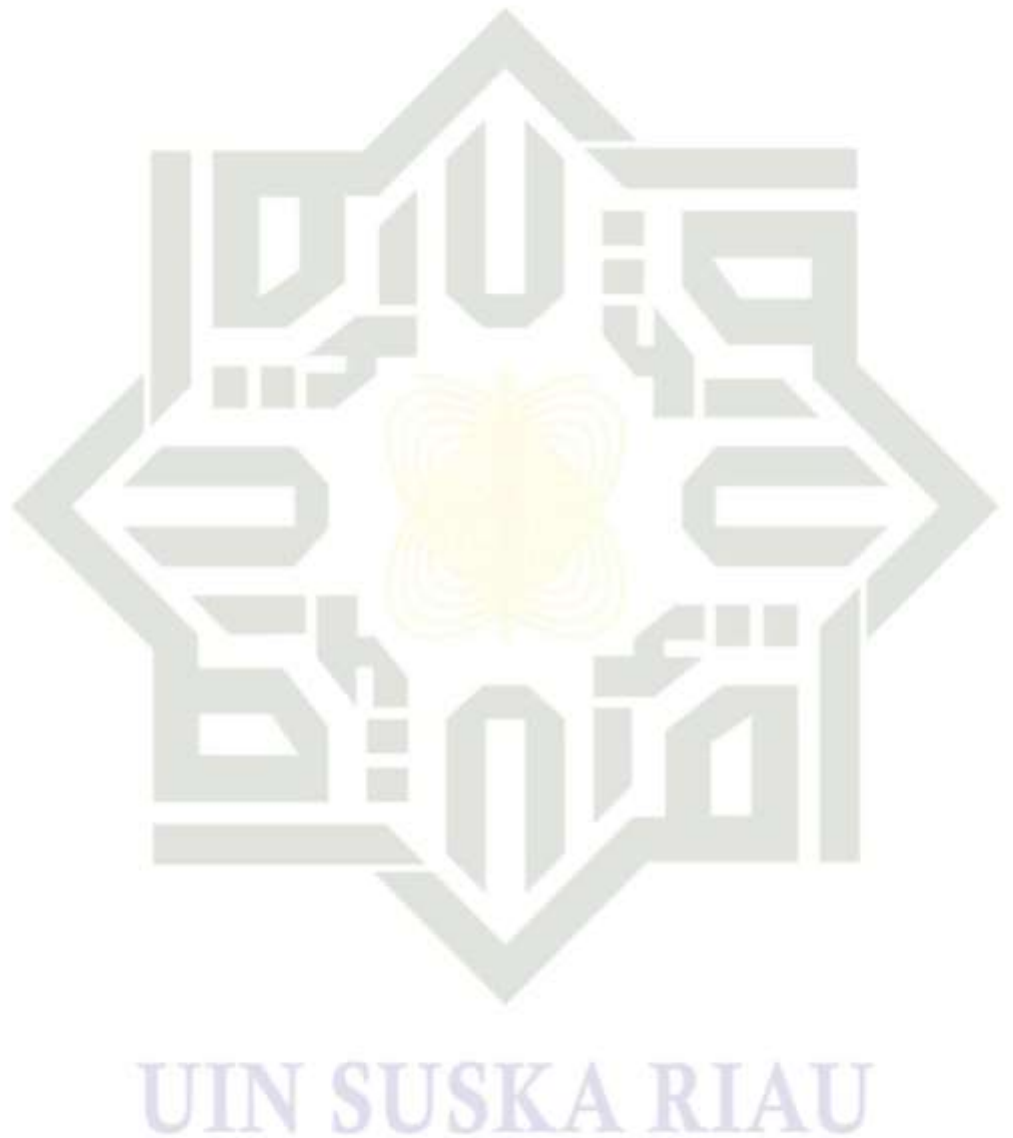


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logo Dinas Perhubungan	39
---	----





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang. Anggaran publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik masyarakat.

Anggaran publik merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh publik, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan publik.

Laporan realisasi anggaran merupakan jenis laporan keuangan daerah yang lebih dahulu dihasilkan sebelum kemudian diisyaratkan untuk membuat laporan neraca dan laporan arus kas. Anggaran dalam sektor publik merupakan tulang punggung (*back-bone*) penyelenggaraan pemerintahan. Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laporan keuangan suatu perusahaan merupakan salah satu bentuk informasi yang dapat disampaikan secara relevan apabila menggunakan sistem yang tepat pula, hal tersebut sangat bermanfaat bagi perusahaan, terutama bagi para pengambil keputusan harus dapat menentukan segala sesuatunya dengan efektif bagi kelangsungan hidup perusahaan.

Efisiensi dan Efektivitas sangat penting dalam pengukuran atau perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan serta terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Menurut (Mahmudi 2011:22), Efisiensi terkait dengan hubungan antara *output* berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut. Sedangkan, efektivitas (hasil guna) merupakan dukungan antara pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai, pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau paket kebijakan.

Penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru lebih ditekankan pada penilaian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat setiap tahun anggaran. Penilaian kinerja melalui LAKIP hanya bertumpu pada *output* yang diperoleh oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan membandingkan rencana yang ingin dicapai tanpa memperhatikan *outcome*. Dengan demikian LAKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi publik tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjelasan kepala UPTD perpajakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Khairunnas,SH mengatakan pemerintah Pekanbaru telah berusaha memaksimalkan berbagai permasalahan perparkiran yang ada terkait dengan masalah yang ada muncul dalam pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru dengan adanya juru parkir liar. Kepala UPTD juga mengatakan adanya juru parkir liar yang seperti ini yang sering terjadi, karena mengutip biaya parkir melebihi yang sudah diatur. Apalagi jika memasuki momen-momen tertentu. Seperti konser, biaya parkir yang dikutip bisa dua hingga tiga kali lipat dari tarif normal. Hal-hal yang seperti itu juga, maka Kepala UPTD ini akan serius untuk mengatasi masalah ini.

Dalam 3 bulan menjabat kumpulkan Rp2,5 miliar sementara, ketika terkait realisasi target PAD retribusi parkir yang sudah dicapai untuk tahun 2019 ini. ditambah dengan realisasi sebelumnya juga sekitar Rp 2.5miliar.

Berarti sudah mencapai Rp 5 miliar yang sudah dikumpulkan hingga pertengahan bulan Juli 2019. Target PAD parkir harus lebih dari 2018 Sedangkan, terkait dengan target yang ditugaskan untuk diperoleh dari Retribusi Parkir 2019 sebanyak Rp 11 miliar lebih.

Kepala UPTD sejauh ini berupaya untuk memenuhi anggaran yang telah ditetapkan dan lebih besar dari anggaran sebelumnya. setidaknya tidak kurang dari anggaran tahun 2018 yang memiliki besar anggaran sebesar Rp 9,3 miliar. Banyaknya terjadi koordinator parkir yang lama dan telah banyak menunggak akibat Retribusi parkir yang tidak di setor-setor.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejauh ini pemerintah selalu berusaha menertibkan parkir liar yang terjadi di Kota Pekanbaru dengan cara dibagikan dalam tujuh zona penentuan pengelolaan parkir dengan sistem swakelola "Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari parkir tepi jalan tahun ini Rp11 miliar lebih.(Patar Simanjuntak/Kamis,01 Agustus 2019).

Pada anggaran pendapatan dan belanja yang diperoleh pada tahun 2019 Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memiliki anggaran sebesar Rp.8,5 milyar disini dapat diperoleh informasi bahwa anggaran 2018 lebih besar tahun 2019.

Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru masih belum mampu menempatkan anggaran yang sesuai, sehingga masih banyak hal-hal yang seharusnya diperbaiki serta ditindak lanjuti sebagai program kerja yang lebih baik.

Namun, terkait dengan hal ini Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru masih belum terlihat efektif serta efisien dalam merealisasikan anggarannya. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul **"Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektifitas Dan Efisiensi Kinerja Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut,maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam merealisasikan anggaran sudah berjalan efektif dan efisien?
2. Bagaimanakah menganalisa pengawasan anggaran pada dinas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perhubungan kota pekanbaru ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam kegiatan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah realisasi anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah berjalan efektif.
2. Untuk menganalisa pengawasan anggaran pada dinas perhubungan Kota Pekanbaru apakah sudah mencapai nilai realisasi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. **Bagi Peneliti**, diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang merealisasikan anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
2. **Bagi Dinas Perhubungan**, diharapkan sebagai gambaran untuk pembuatan sistem yang harus diubah dan diperbaiki, selanjutnya untuk bahan perbandingan agar bisa mempermudah dalam proses pengelolaan data, pelayanan, dan sistem pelaporannya.
3. **Bagi Peneliti Lain**, diharapkan sebagai bahan perbandingan dan pengembangan penelitian lebih lanjut untuk penelitian selanjutnya, serta dijadikan bahan kepustakaan yang akan memberikan kontribusi pemikiran dan masukan yang positif.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. **Bagi Universitas Islam Negeri Suska Riau,** Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan ,wawasan, dan pengetahuan, baik bagi mahasiswa UIN SUSKA RIAU maupun pihak lain yang berkepentingan terkait dengan topik yang di teliti oleh penulis.

E. Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang penulisan penelitian ini, maka secara garis besar materi pembahasan dari masing-masing bab tersebut dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal dalam melakukan penelitian ini yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang melandasi penelitian ini yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini menguraikan tentang variabel-variabel yang akan diteliti dan definisi operasional, jenis dan sumber data, penentuan sampel, metode pengumpulan data dan teknik analisis.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN HASIL PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil analisis dan pengolahan data serta kemudian menginterpretasikannya serta gambaran umum lokasi penelitian yang bersangkutan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan penelitian yang dibuat berdasarkan hasil penelitian serta memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**LANDASAN TEORI****A. Pengertian Anggaran Sektor Publik**

Anggaran Sektor Publik adalah perencanaan finansial tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan anggaran. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Karena pada sektor publik anggaran harus diinformasikan kepada publik untuk di kritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Penggunaan anggaran pada sektor publik sebagai alat penuntun bagi perencanaan dan pengendalian sumber daya, baik itu keuangan atau sebaliknya.

Sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu bangsa. Kegagalan pada sektor publik dapat berdampak pada terganggunya sektor bisnis dan sosial yang dapat memicu kondisi krisis suatu bangsa. Oleh karena itu, pembangunan sektor publik harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak boleh diabaikan. (Sasongko dan Parulian, 2015:2), berpendapat bahwa Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang teruang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran diantaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan.

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktifitas dalam satuan moneter. Pada sektor publik, anggaran harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrument



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program- program yang dibiayai dengan uang public.

Anggaran sebagai salah satu alat bantu manajemen memegang peranan penting karena dengan anggaran manajemen dapat merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi jalannya suatu kegiatan. Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang (Nafarin, 2012:19). Sedangkan pengertian anggaran menurut "Commite on Governmental Accounting" yang dikutip oleh (Haruman, 2010:6) anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Menurut Indra Bastian (2010;166) Anggaran mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a) Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan.
- b) Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satuan atau beberapa tahun.
- c) Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
- d) Usulan anggaran telah disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
- e) Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Fungsi Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu:

a) Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (*Planning Tool*)

Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berupa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

1. merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan,
2. merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya,
3. mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun,
4. menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

b) Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (*Control Tool*)

Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya *overspending*, *underspending* dan salah sasaran dalam pengalokasian anggaran dalam bidang lain yang bukan merupakan prioritas.

Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu:

1. Membandingkan kinerja actual dengan kinerja yang dianggarkan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menghitung selisih anggaran (*favourable* dan *unfavourable variances*)
3. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (*controllable*) dan yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) atas suatu varians,
4. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.

c) Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*)

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

d) Anggaran Sebagai Alat Politik (*Political Tool*)

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Dalam pembuatan anggaran publik membutuhkan *political skill*, *coalition building*, keahlian bernegosiasi dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik.

e. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (*Coordination and Communication Tool*)

Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.

f. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja (*Performance Measurement Tool*)

Anggaran merupakan wujud komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai, dikaitkan dengan anggaran yang ditetapkan.

g. Anggaran Sebagai Alat Motivasi (*Motivation Tool*)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan staffnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat *challenging but attainable* atau *demanding but achievable* maksudnya target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

h. Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik (*Public Share*)

Fungsi ini hanya berlaku pada organisasi swasta anggaran merupakan dokumen rahasia yang tertutup untuk publik. Masyarakat dan elemen masyarakat lainnya non publik, seperti LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan, dan organisasi masyarakat lainnya, harus terlibat dalam proses



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penganggaran publik. Keterlibatan mereka dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Keterlibatan langsung masyarakat dalam proses penganggaran dapat dilakukan mulai dari proses penyusunan perencanaan pembangunan maupun rencana kinerja publik (daerah), sedangkan keterlibatan secara tidak langsung dapat melalui perwakilan mereka di lembaga legislatif (DPR/DPRD).

C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana penerimaan dan pengeluaran daerah yang meliputi rencana pendapatan, belanja, bagi hasil, cadangan, dan pembiayaan yang disetujui oleh DPRD dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara).

Menurut Mahsun (2011:81), Definisi anggaran pendapatan dan belanja daerah juga merupakan daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran belanja daerah selama satu tahun. APBD merupakan rencana kerja kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan beban yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran (Halim, 2012:10).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut.

Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

APBD terdiri dari anggaran pendapatan dan pembiayaan, pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus, kemudian pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat. Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

2. Fungsi APBD

Fungsi APBD jika ditinjau dari kebijakan fiskal yaitu:

- a. Fungsi otorisasi yaitu bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

3. Tujuan APBD

Setiap tahun pemerintah daerah menyusun APBD. Tujuan penyusunan APBD adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis, dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan di daerah demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Pada akhirnya, semua itu ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta untuk mengatur pembelanjaan daerah dan penerimaan daerah agar tercapai kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara merata.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No.32 tahun 2004 Pendapatan Daerah, adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah menurut UU No.32 tahun 2004, terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli daerah (PAD), berasal dari: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- b. Dana Perimbangan, merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(DAU) dan Dana Alokasi Khusus(DAK).

- c. Lain - lain pendapatan daerah yang sah adalah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana Perimbangan meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.
5. Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2014 belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

D. Laporan Realisasi Anggaran Publik**1. Pengertian Laporan Realisasi Anggaran Publik**

Laporan realisasi anggaran yang disebut dengan LRA merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri atas unsur pendapatan dan belanja.

Laporan realisasi anggaran yang disusun dalam laporan keuangan akan dijelaskan secara rinci dalam suatu catatan atas laporan keuangan. Penjelasan tersebut akan memuat informasi-informasi yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka - angka yang perlu diberikan penjelasan lebih lanjut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta resiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu, laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pemerintah pusat dan daerah serta resiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu, laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran Publik

Tujuan standar laporan realisasi anggaran adalah mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan dan menetapkan dasar – dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintahan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan. Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

realisasi dan anggaran entitas secara tersanding. Penyingkapan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target – target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksikan sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah. Laporan tersebut juga memprediksi resiko ketidakpastian dari sumber – sumber daya ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan pemerintah tersebut.

Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan:

1. Telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan hemat.
2. Telah sesuai dengan anggarannya.
3. Telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

3. **Komponen Laporan Realisasi Anggaran Publik**

1. Pendapatan LRA

Pendapatan negara/daerah merupakan iuran rakyat yang diamanatkan kepada Pemerintah, sehingga pendapatan LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum Negara/Daerah. Pembukuan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat notenya namun ketika biaya atas pendapatan tersebut bersifat variabel dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka dapat mencatat nilai netonya.

2 Belanja

Belanja adalah pengurangan ekuitas dana lancar pemerintah untuk pengeluaran yang ditetapkan dalam dokumen otoritas kredit. Belanja disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

Pembayaran belanja dapat dilakukan secara langsung atau melalui dana kas kecil yang diberikan kepada para bendahara pengeluaran. Pembayaran diberikan langsung kepada yang berhak jika jumlah, peruntukan, dan penerimanya sudah pasti. Dana kas kecil digunakan pemerintah untuk membayar keperluan sehari – hari kantor. Pada dasarnya pemerintah menggunakan sistem dana tetap. Jika terjadi kekeliruan dalam pengeluaran belanja maka koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurangan belanja pada periode yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Surplus /Defisit-LRA

Surplus – LRA adalah selisih lebih antara pendapatan – LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit – LRA adalah selisih kurang antara pendapatan – LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit – LRA. Perhitungan surplus/defisit – LRA dilakukan di tingkat pemerintah pusat atau daerah melalui jurnal penutup pada saat dilakukan proses konsolidasi.

4. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun bertahun – tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran publik terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan kas daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi publik, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali.

Pinjaman yang diberikan pihak ketiga, dan penjualan investasi permanen lainnya. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat uang diterima pada rekening Kas Umum Negara/Daerah, dan dicatat berdasarkan asas bruto. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara/Daerah.

5. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran(SiLPA/SiKPA)

Selisih lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. SiLPA/SiKPA diperoleh dari penutupan akun Surplus/Defisit dan pembiayaan neto pada akhir tahun anggaran, untuk selanjutnya dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Publik
Tabel 2.1 Laporan Realisasi Anggaran 2015 sampai 2019

No.	Tahun	Penyusunan Anggaran	Realisasi	%
1	2015	50.340865.132,00	35.162.150.408,00	69,85
2	2016	46.695.530.956,00	37.441.310.779,00	80,18
3	2017	170.379.105.986,00	143.144.980.834,00	84,02
4	2018	187.698.805.168,00	126.174.858.941,00	67,22
5	2019	110.908.837.140,00	81,794.396.270,00	73,75

Sumber : Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Pengertian Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Anggaran Sektor Publik

1. Pengertian Efektivitas Kinerja Anggaran Sektor Publik

Efektivitas kinerja anggaran sektor publik adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah diterapkan. Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan outputnya (*cost of outcome*).

Menurut Mahmudi (2011:22) efektivitas (hasil guna) merupakan dukungan antara pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau paket kebijakan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran aktif kebijakan.

Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dan keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin kontribusi output yang dihasilkan berperan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Pengukuran efektivitas bisa dilakukan hanya dengan mengukur *outcome*. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran penerimaan target

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan anggaran penerimaan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{realisasi penerimaan PAD}}{\text{anggaran penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

2. Pengetian Efisiensi Kinerja Anggaran Sektor Publik

Efisiensi kinerja anggaran sektor publik diukur dengan rasio antara *output* dan *input*. Pengukuran efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas, pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan. Efisiensi kinerja anggaran sektor publik lebih bersifat relatif.

Menurut Raharjo (2011:169) mengemukakan bahwa efisiensi merupakan suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan dengan penuh kemampuan yang dimiliki. Secara sistematis, efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dan *input* atau dengan istilah lain *output* per unit *input*.

Efisiensi berarti tingkat pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Rasio efesiensi} = \frac{\text{realisasi belanja langsung}}{\text{anggaran belanja}} \times 100 \%$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Manfaat Analisis Realisasi Anggaran Sektor Publik

1. Menyediakan informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas pengguna anggaran.
3. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

G. Kinerja Dalam Pandangan Islam

Abdul Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa derajat atau tingkatan dineraka mengarah kebawah, sedangkan derajat disurga mengarah ke atas (tafsir Ibnu Katsir).

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Ahqaaf ayat 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفَيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya :” Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah pasti akan memebalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapatkan hasil yang baik pula dari kerjaannya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya.

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-A'raaf ayat 39 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَذُوْقُوْا الْعَذٰبَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ وَقَالَتْ اُولٰٓئِهٖمُ
لَاۤ اٰخِرَ اَھُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلٰٓ

Artinya : *‘Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian:’Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikitpun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan ‘.*

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya segala kelebihan hanya milik Allah, oleh karena itu bekerja tidak hanya sebatas ubuddiyah saja,karena pekerjaan merupakan proses yang frekuensi logisnya adalah pahala (balasan) yang akan kita terima. Dalam konteks ini,pekerjaan tidak hanya bersifat ritual dan ukhrowi,akan tetapi juga merupakan sosial yang bersifat duniawi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firman Allah dalam Q.S At-Taubah ayat 105:

ثَوْنٍ إِلَىٰ عِلْمٍ وَّكَلِّ أَعْمَلُوا فَسَيَرَىٰ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتَرِ
عَمَلُونَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ ت

Artinya: "Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."

Ayat ini juga berisikan peringatan keras atas perbuatan orang-orang yang menyalahi perintah agama. Segala yang diperbuat akan dimintai pertanggungjawaban kelak di Hari Kiamat. Maka, semua aib dan perbuatan buruk serta kejahatan lainnya akan terlihat.

QS. Al-Jumuah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا

Artinya:” Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi : telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, dan telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang–undangan.

Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Siti mardiya ulfa (2015-2017)	Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Medan Tahun Anggaran 2015-2017	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangannya sangat efektif dan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan efisien.
2	Nining Yunia Artanti (2007)	Analisis kinerja Keuangan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Di Pemerintahan Kab. Magetan 2007.	Hasil penelitian tingkat efektivitas daerah menurut pemerintah daerah kabupaten Magetan untuk tahun 2007 sangat efektif
3	Ariel Sharon Sumenge (2013)	Analisis Efektivitas dan Efisiensi pelaksanaan anggaran belanja badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan (2008-2012).	Hasil penelitian tingkat efesien belanja BAPPEDA Kabupaten Minahasa selatan berfluktuasi dari tahun ke tahun berada di kriteria sangat efesien.
4	Cindy Kareima Waney (2012-2016)	Analisis Realisasi Anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah pertanian dan Perternakan Provinsi Sulawesi Utara.	Hasil penelitian tingkat efektivitas anggran belanja tidak tetap dari tahun ke tahun, dari yang cukup efektif samapai mengalami peningkatan yang efektivitas .
5	Kiky Muryanti (2017)	Analisis Realisasi Anggaran untuk	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Wonogiri Tahun Anggaran 2011-2015	perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangannya sangat efektif dan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan efisien.
--	---	---

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada tempat penelitian dan sampel penelitian yang diteliti.

Pada penelitian sebelumnya menjelaskan tentang :

1. Siti Mardiyah ulfa ‘‘Analisis realisasi anggaran untuk menilai efektivitas dan efesiensi kinerja pada dinas perhubungan kota Medan 2015-2017’’

Penelitian ini menggunakan sampel penelitian anggaran selama 2 tahun.

2. Nining Yunia Artanti 2007)’’Analisis kinerja Keuangan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Di Pemerintahan Kab. Magetan 2007.

Penelitian ini menggunakan sampel penelitian anggaran selama 1 tahun.

3. Ariel Sharon Sumange (2013)’’ Analisis Efektivitas dan Efesiensi pelaksanaan anggaran belanja badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan (2008-2012).

penelitian ini menggunakan sampel penelitian anggran selama 5 tahun.

4. Cindy Kareima Waney (2012- 2016)Analisis Realisasi Anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah pertanian dan Perternakan Provinsi Sulawesi Utara.

penelitian ini menggunakan sampel penelitian anggaran selama 5 tahun.

Kiky Muryanti (2017), ‘‘Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Wonogiri Tahun Anggaran 2011-2015”.

Peneliti ini menggunakan sampel penelitian anggaran selama 5 tahun.

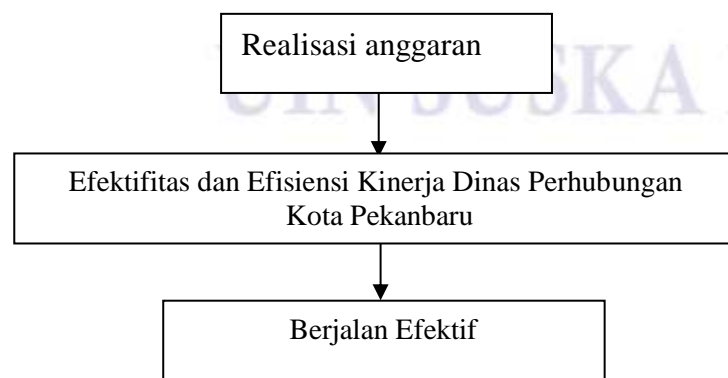
Sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang :

Fitra pida (2020),”Analisis Realisasi Anggaran untuk menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru”.

Sampel penelitian peneliti ini menggunakan sampel anggarannya selama 5 tahun.

H. Kerangka Konseptual

Definisi kerangka konseptual menurut FASB (*Financial Accounting Standards Board*) adalah suatu sistem yang koheren dari hubungan antara tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standar yang konsisten dan yang menjelaskan sifat, fungsi serta keterbatasan akuntansi dan laporan keuangan. Penelitian ini akan mengulas tentang permasalahan realisasi anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja, yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.3**Kerangka konseptual**

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:11) : “penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain”.

B. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Jl.Dr.Sutomo No. 88, Kota Pekanbaru , Riau 28155. Telp.0811-769-466. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Februari 2020 sampai dengan selesai.

C. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Nanang Martono (2011:74) “Populasi merupakan keseluruhan objek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat – syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti”. Berdasarkan pendapat diatas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru .

b. Sampel

Menurut Nanang Martono (2011:74) “Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri – ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampel dapat didefinisikan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi". Sampel dalam penelitian ini adalah Realisasi Anggaran tahun 2015-2019 yang ada di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah (Kasubag keuangan dan program dinas hubungan kota pekanbaru), Sarwono,S.ST NIP.19840206 200604 1002.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi Operasional adalah definisi yang dibuat spesifik sesuai dengan kriteria pengujian atau pengukuran,dibentuk dengan cara mencari indikator empiris konsep. Jadi pengertian yang biasa didapatkan dari definisi tersebut adalah bahwa di dalam sebuah penelitian ada sesuatu yang memang menjadi sasaran, misalnya variabel itu tadi. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran Sektor Publik adalah Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri atas unsur pendapatan dan belanja.

Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sektor Publik, Efektivitas kinerja anggaran sektor publik adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan outputnya (cost of out come).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Efisiensi kinerja anggaran sektor publik lebih bersifat relatif. Pengukuran efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas, pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan.

E. Jenis Data dan Sumber Data**a. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Menurut Sugiono (2010:15) jenis data terbagi dua macam yaitu: data kualitatif adalah yang berbentuk deskriptif atau uraian lain dan pengukurannya tidak dapat menggunakan skala numerik, data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sehingga untuk bisa dilakukan pemrosesan statistik, bentuk penelitian kualitatif harus disajikan dalam angka-angka (kualitatif yang dikuantitatifkan).

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Menurut Sugiyono (2012:141) bahwa data sekunder adalah “sumber data yang diperoleh dengan membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen resmi yang dikeluarkan oleh dinas terkait”. Peneliti menggunakan data sekunder karena peneliti mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah oleh pihak yang berwenang dalam bentuk dokumen seperti laporan realisasi anggaran dan data lain yang diperlukan dalam penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut.

a. Teknik Wawancara

Menurut Sugiyono (2013:231) bahwa “Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu” yaitu penulis melakukan tanya jawab kepada pihak yang terkait dan berwenang di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tentang realisasi anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja.

b. Teknik Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) “Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu”. Jadi penulis juga melakukan pengumpulan informasi data akuntansi, dokumen-dokumen dan catatan seperti laporan realisasi anggaran dan data lainnya yang diperlukan pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

c. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Analisis data menurut Sugiyono (2013:244) adalah “proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”. Analisis ini dilakukan dengan cara menganalisis, menafsirkan, dan mengolah data pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, sehingga dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu analisis realisasi anggaran untuk menilai efektifitas dan efisiensi kinerja.

d. Analisis Efektivitas

Menurut Halim (2012:10) : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spendingwisely*). Indikator efektifitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program.

Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan publik dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi *riil*.

Kinerja sektor publik dikatakan efektif apabila rasio antara 90,01% s/d 100%, semakin tinggi rasio efektivitas berarti kinerja akan semakin baik dan semakin rendah rasio efektivitas berarti semakin buruk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Yunianti, 2015). Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran penerimaan dengan target anggaran penerimaan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PDA}}{\text{Anggaran penerimaan PA}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka pendapatan dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil perbandingan mencapai 100%, maka pendapatan dikatakan efektif.
3. Jika hasil perbandingan mencapai 90-99%, maka pendapatan dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil perbandingan mencapai 75-89%, maka pendapatan dikatakan kurang efektif.
5. hasil perbandingan mencapai dibawah 75%, maka pendapatan dikatakan tidak efektif

Efesiensi adalah hubungan antara masukan (input) dan keluaran (output), efesiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mencapai tujuan organisasi perangkat public dapat tercapai manfaat tertentu.

Input merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

Output adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik. Efisiensi berarti tingkat pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{rasio efisiensi} = \frac{\text{realisasi belanja}}{\text{anggaran belnaja}} \times 100\%$$

Kriteria analisis efesiensi dapat dikategorikan sebagai :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
2. Jika hasil perbandingan 90- 100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efesien.
3. Jika hasil perbandingan mencapai 60-80% maka anggaran belanja dikatakan efisien.
4. Jika hasil perbandingan mencapai dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

Menurut keputusan keputusan Menteri dalam negeri Nomor 690.900-327

Tahun 1996, Mengenai tingkat Efesiensi Anggaran Belanja



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru kurang maksimal dan kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum berhasil ini dapat dilihat dari hasil pengukuran lingkak efektifitas dan efisiensi sebagai berikut:

1. Efektifitas

Berdasarkan hasil perhitungan tahun 2015 berawal sebesar 69,85%, dan pada tahun 2016 sebesar 80,18% terjadi peningkatan 10,93 % , dan dari tahun 2016 sbesbesar 80,18% ke tahun 2017 sebesar 84,02% terjadi peningkatan sebesar 3,84%, dari tahun 2017 sebesar 84,02% dan tahun 2018 sebesar 65,87% terjadi penurunan 18,87%, dan dari tahun 2018 67,22% tahun 2019 sebesar 73,75% terjadi penimngkatan 6,53%. Dilihat dari perhitungan tersebut kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah efektif karena hasil yang dicapai 60% keatas.

Peningkatan yang terjadi pada anggaran belanja realisasi pada dinas perhubungan kota pekanbaru adalah memprioritaskan kegiatan sesuai topoksi dengan mengerjakan kegiatan tepat pada waktunya sesuai dengan prioritas serta

Anggaran yang cukup sesuai yang di realisasikan.. Sedangkan penurunan atau jatuhnya anggaran belanja realisasi disebabkan tidak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercapainya target anggaran belanja yang telah ditetapkan serta penanggung jawabnya tidak bekerja secara maksimal pada waktu yang disesuaikan perusahaan, serta anggaran disalahgunakan oleh pihak yang bersangkutan.

2 Efisiensi

Berdasarkan tingkat efisiensi realisasi belanja langsung dan realisasi belanja pada tahun 2015 sebesar 74,45%, pada tahun 2016 tingkat efisiensi realisasi belanja langsung dan realisasi belanja adalah 74,91% meningkat sebesar 0,45 %, dari tahun 2016 74,91% ke tahun 2017 tingkat efisiensi realisasi belanja langsung dan realisasi belanja sebesar 94,16% terjadi peningkatan 19,25 % , dan dari tahun 2017 sebesar 94,16 % ke tahun 2018 sebesar 92,32 % terjadi penurunan sebesar 16,91%, dan dari tahun 2018 sebesar 92,32% ke tahun 2019 sebesar 88,75% terjadi penurunan 3,57% . Pada tahun 2017 tingkat efisiensi realisasi belanja langsung dan realisasi belanja sebesar 94,16%.

Pada anggaran realisasi yang didapat terjadi naik turun nilai realisasi penyebabnya sebagai berikut tahun 2015 ke tahun 2016 terjadi peningkatan karena kecil iuran tunjangan pph atau tunjangan khusus, dari tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi peningkatan karena kecil belanja pegawai yang dikeluarkan, dari tahun 2017 ke tahun 2018 terjadi penurunan karena rendahnya tunjangan pph atau tunjangan khusus yang diterima , dari tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi peningkatan karena tambahan penghasilan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan prestasi kerja

Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru kinerjanya sudah berjalan efektif sesuai yang di targetkan dan sudah mencapai nilai realisasinya sesuai ketentuan walaupun terjadi naik turunnya anggaran realisasi yang sudah ditentukan dan tidak pernah di bawah rata rata. 60%.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bias menggambarkan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya. Selain itu , diharapkan penelitian selanjutnya untuk menambah lagi jangka waktu penelitian ,sehingga hasil penelitiannya lebih andal dan akurat dari pada hasil penelitian oleh penulis.

2. Bagi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

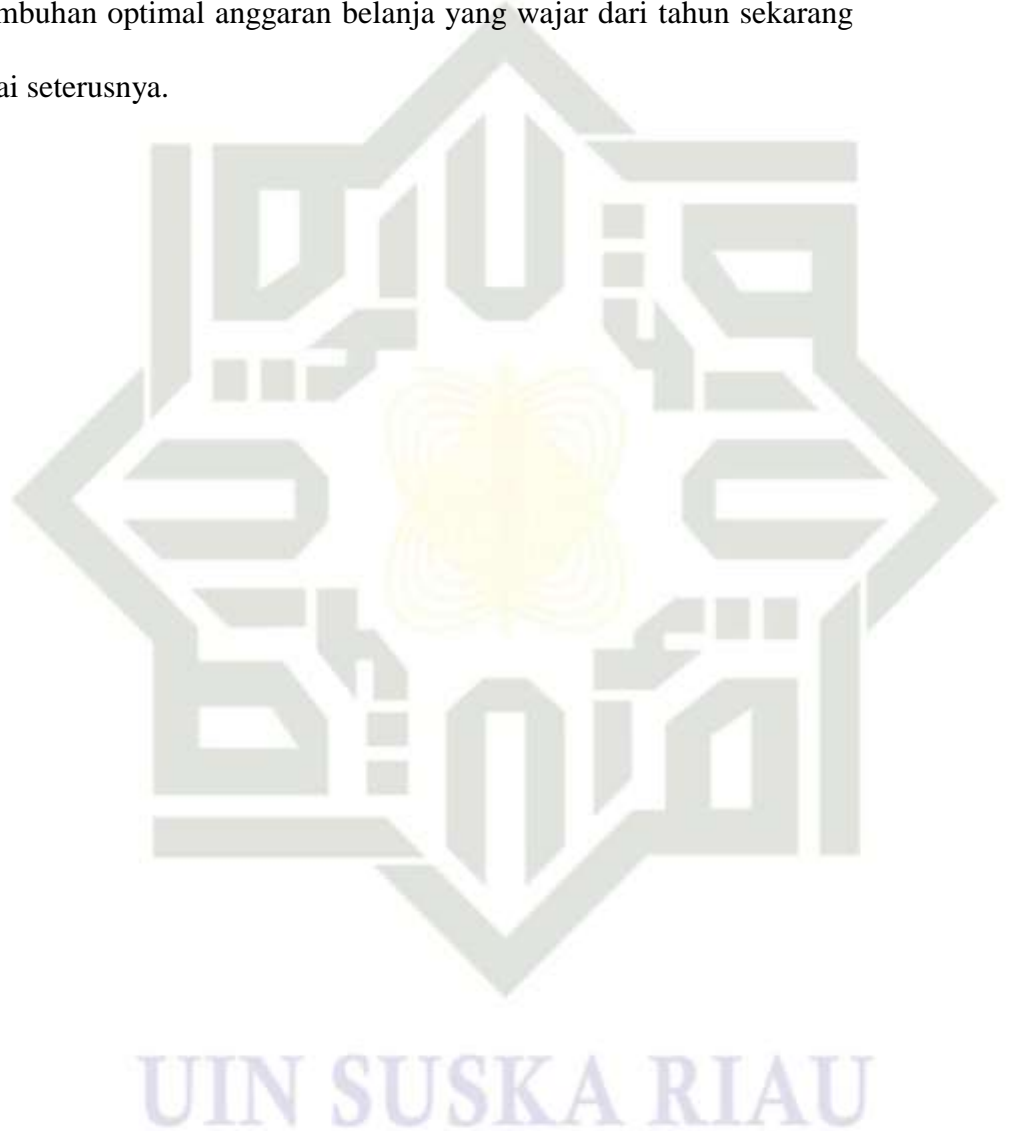
- a. Dari segi pertumbuhan belanja berdasarkan periode tersebut memberikan gambaran bahwa angka persentase yang ditunjukan dari hasil perhitungan bisa saja dijadikan acuan untuk penyusunan anggaran agar lebih baik lagi di periode tahun anggaran selanjutnya.
- b. anggaran belanja daerah yang telah dilakukan berdasarkan alat analisi menunjukan bahwa penyerapan kinerja anggran yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksimum, terutama bagi perencanaan dan pengembangan daerah.

Anggaran agar optimalisasi yang diinginkan segera terlaksanakan sesuai visi dan misi Dinas Perhubungan kota Pekanbaru. Dalam hal efesiensi belanja Dinas Perhubungan agar lebih mantap meningkatkan pertumbuhan optimal anggaran belanja yang wajar dari tahun sekarang sampai seterusnya.





DAFTAR PUSTAKA

- Al-qur'an. surah Al-Ahqaaf ayat 19 dan surah Al-A'raaf ayat 39.
- Al-qur'an surah Q.S At-Taubah ayat 105 dan Q.S Al-Jumuah ayat 10
- Alim, M Nizarul. 2008. *Efektivitas Perpaduan Komponen Anggaran dalam Prosedur Anggaran: Pengujian Kontijensi Matching*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol 10 (2). November. Hal 69-76
- Bastian Indra, 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Erlangga : Jakarta
- Halim, Abdul dan Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Salemba Empat : Jakarta
- Haruman dan Sri Rahayu, 2010. *Penyusunan Anggaran*. Edisi Pertama, Salemba Empat : Jakarta.
- Mahmudi, 2011. *Akuntansi sektor Publik*. Cetakan Pertama. UII Press. Yogyakarta
- Mahsum, Moh, Firma Sulistyowati & Heribertus Andre Purwanugraha, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*, BPFE : Yogyakarta
- Martono, Nanang, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis*. PT Raja Grafindo : Jakarta
- Nafarin, 2012. *Penganggaran Rencana Kerja Perusahaan*. Edisi Kesatu, Salemba Empat Jakarta.
- Rahardjo dan Adisasmita, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Cetakan Pertama, Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta
- Sugiono, 2010. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Sugiono, 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta
- Sasongko dan Parulian, 2015. *Anggaran*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sulianti Umi, 2015. *Analisis Efesiensi dan Efektifitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdesa)*. Seminar Nasional Universitas PGRI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Yogyakarta. ISBN.

<https://www.riaubangkit.com/beritaku1497-demi-PAD,-tata-kembali-pengelolaan-parkir-pekanbaru.html>

<http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/991>



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

Nama : Sarwono,S.ST
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program Dinas
 Perhubungan Kota Peknbaru

Keterangan : p : mahasiswa
 J : kasubag dinas perhubungan.

Semakin besar rasio efektivitas berarti kinerja pemerintah semakin baik.

Prosedur penyusunan anggaran tersebut, peneliti dapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 Desember 2020 dengan Kasubag Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Adapun kutipan dialog percakapan antara peneliti dengan Kasubag Program dan Perencanaan yaitu :

P : apakah perusahaan mempunyai anggaran biaya ? (1)

J : Iya ada.

P : apakah kegiatan dinas perhubungan berdasarkan prosedur pemerintah yang berlaku? (2)

J : Iya sudah

P : Apakah kegiatan yang dilakukan dinas perhubungan telah mencari

Alternatif yang terbaik dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas ? (3)

J : Iya sudah dilakukan

P : Apakah yang dilakukan dinas perhubungan telah dilakukan secara efektivitas dan efisiensi ? (4)

J : Iya sudah sesuai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

P : apakah sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dapat dipahami oleh penggunanya? (5)

J : Iya bisa

P :apakah sistem anggaran realisasi pada dinas perhubungan sudah berjalan lancar yang telah di tetapkan ? (6)

J : Iya sudah sesuai

P : Apakah upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru agar anggaran realsasinya selalu efektif dan efesiensi ? (7)

J : Memprioritaskan kegiatan sesuai topoksi

P : apakah pernah anggaran realisasi berlebih atau kurang dalam melakukan Kegiatannya,yang seharusnya pas karna telah di anggarkan (8) ?

J : Iya pernah

P : Bagaimana cara dinas perhubungan menjaga laporan keuangannya agar selalu sesuai efektivitas dan efisensinya? (9)

J : Dengan mengerjakan kegiatan tepat pada waktunya sesuai dengan prioritas

P : Apakah akan ada peraturan daerah yang akan dikeluarkan? Mohon dijelaskan? (10)

J : Belum ada

P: Bagaimana cara dinas perhubungan mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan Anggarannya?(11)

J: Dengan melihat lagi anggaran dinas dan realisasi yang sudah dikerjakan.

P : Apakah ada perberbedaan peraturan pengukuran efektivitas dan efisiensi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pada dinas lain ? (12)

J : Tidak ada.

P : Apabila tidak tercapainya target yang di tetapkan sesuai efektivitas dan efisiensi apa yang biasa dinas lakukan (13)

J : Melakukan reconfusing kegiatan

P : Dalam tidak tercapainya target realisasi sesuai efektivitas dan efisiensi siapa yang harus bertanggung jawab ? (14)

J : Pejabat pelaksana teknis kegiatan

P : Apa tanggapan bapak melihat perkembangan anggaran realisasi pada 5 tahun belakangan ini ? (15)

J : Sejauh ini realisasi anggaran sudah cukup bagus dan terus meningkat.

P : Apa dampak keseluruhan dari terjadinya tidak tercapainya target realisasi? (16)

J : Kinerja instansi akan menurun.

P : Adakah peraturan tersendiri dalam merealisasikan anggaran nya siapa yang telah membuat peraturan realisasi padadinas perhubungan ?(17)

J: Tidak ada

P :Selama bapak menjabat perkembangan apa saja yang terjadi dalam laporan anggaran realisasi? (18)

J :Penyiapan anggaran pada setiap kegiatan tercapai.

P :Apa kegiatan sekarang yang dilakukan dinas perhubungan agar anggaran realisasi bisa meningkat ? (19)

J : Melakukan kegiatan sesuai dengan prioritas topoksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

P : Apa saja kegiatan dinas perhubungan yang berkaitan dengan anggaran realisasi, jelaskan contohnya ? (20)

J : Semua kegiatan ada realisasinya terhadap regu kegiatan yang tertera pada DPA.

Foto dokumentasi selesai wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Assalamua'laikum Wr. Wb



Nama lengkap Fitra Pida dilahirkan di Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 09 November 1996. Peneulis ini merupakan putri dari Ayahanda Syafrudin dan Ibunda Marlina.

Penulis adalah anak ketiga dari Sembilan bersaudara, penulis ini mulai masuk SD pada tahun 2004 di SD Negeri 001 Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Povinsi Riau dan

lulus tahun 2009, Selanjutnya melanjutkan kejenjang pendidikan SMP di SMP Negeri 1 Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dan lulus pada tahun 2012, penulis melanjutkan pendidikan SMA di SMA Negeri 1 Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dan lulus pada tahun 2015.

Pada tahun 2016 penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan mengambil jurusan S1 Akuntansi dengan konsentrasi Akuntansi Manajemen .Selama masa perkuliahan, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di PT.Asuransi Syariah Al-amin Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tahun 2018, selanjutnya penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) selama kurang lebih dua bulan di kampung Perincit Kecamatan Pusako Kabupaten Siak Povinsi Riau.Penulis telah dinyatakan lulus S1 pada 06 Oktober 2021 dengan judul Analisis Realisasi Anggaran untuk menilai Efektivitas dan Efisiesi kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru